

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor non keuangan.¹

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan atau urusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah Pendapatan Asli Daerah yang dikenal dengan istilah PAD di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal ini pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU no 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan UU no 34 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU no 28 tahun 2009.

¹ Sulistyowati, Diah. 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal. FE UNDIP hal 1

Desentralisasi atau otonomi daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah salah satunya berupa pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.²

PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah sebelumnya kurang mendapat perhatian, keadaan ini disebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sumber dana pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari pemerintahan pusat sementara kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penggunaan dana tersebut relatif terbatas.³ Semakin

² Mayasari, Dian.2009. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisis terhadap kabupaten dan kota di Jawa Timur). FE UMM. Hal 3

³ Ranga Diza, Mohd.2009. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Sumatera Utara FE USU. Hal 2

besar pajak dan retribusi daerah yang diterima maka akan semakin meningkatnya PAD kabupaten atau kota tersebut. Kemandirian suatu kabupaten atau kota dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh dan dalam membiayai pengeluaran untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat untuk membantu dan memfasilitasi sarana dan prasana masyarakat.

Kabupaten Banyuasin dibentuk berdasarkan pertimbangan pesatnya perkembangan dan kemajuan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan umumnya dan khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin yang diperkuat oleh aspirasi masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Status daerah yang semula tergabung dalam Kabupaten Musi Banyuasin berubah menjadi Kabupaten tersendiri yang memerlukan penyesuaian, peningkatan maupun pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya roda pemerintahan.⁴

Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Sumatera Selatan sebagai besar penduduknya memiliki mata pencarian sebagai nelayan dan petani. Perkembangan dan Pemekaran di Wilayah Kabupaten Banyuasin berdampak pada industri, karena di kabupaten Banyuasin banyak didirikan perusahaan-perusahaan industri baik dalam skala

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin. www.banyuasinkab.bps.go.id (diakses 12 november) 2014 jam 21.00 wib

besar maupun *home industri* kemudian disusul oleh bidang pertanian dan perkebunan⁵.

Kabupaten Banyuasin berada pada posisi potensial dan strategis dalam hal perdagangan dan industri, maupun pertumbuhan sektor-sektor pertumbuhan baru. Yang merupakan daerah penyelenggara pertumbuhan Kota Palembang terutama untuk sektor industri. Bila dikaitkan dengan rencana Kawasan Industri dan pelabuhan Tanjung Api-api Kabupaten Banyuasin sangat besar peranannya bagi kabupaten di sekitarnya sebagai pusat industri hilir, jasa distribusi produk sumber daya alam baik pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, dan pertambangan sehingga akan melahirkan kembali kemasyuran Bandar Sriwijaya milik Kabupaten Banyuasin⁶.

Sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Banyuasin (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai Rp 16,92 milyar, sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp 15,12 milyar. Struktur ekonomi Kabupaten Banyuasin masih didominasi oleh sektor primer (pertanian dan pertambangan) sebesar 44,03% PDRB Banyuasin di sumbang oleh sektor ini. Sumbangan sektor primer terutama berasal dari sektor pertanian sebesar 30,54% sedangkan sektor pertambangan sebesar 13,49%.⁷

Sektor sekunder (sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan) yang memberikan kontribusi sebesar 33,86% pada PDRB banyuasin. Sumbangan sektor sekunder terutama diberikan oleh

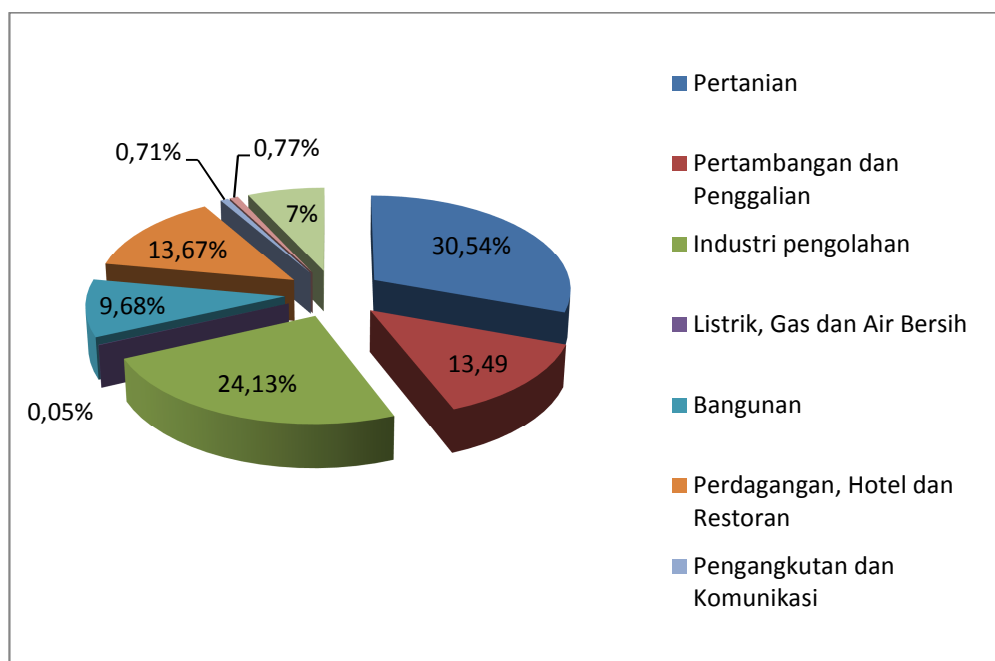
⁵ Lembaga Pemetaan Sosial Daerah-daerah penghasil Minyak dan gas www.migas.bisbak.com/1607.html (diakses 25 agustus 2014) jam 20.00 wib

⁶ Pemerintah Kabupaten Banyuasin. www.banyuasinkab.go.id (diakses 12 november 2014) jam 15.00 wib

⁷ Banyuasin dalam Angka 2014. www.banyuasinkab.bps.go.id (diakses 12 november 2014) jam 13.00 wib

sektor industri pengolahan sebesar 24,13%. Sumbangan sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa) terhadap PDRB Banyuasin sebesar 22,12%. Pada sektor ini sumbangan terbesar berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 13.67%

Gambar 1.1
Distribusi Persentase Kabupaten Banyuasin Menurut Lapangan Usaha
ADHB
Dengan Migas Tahun 2013



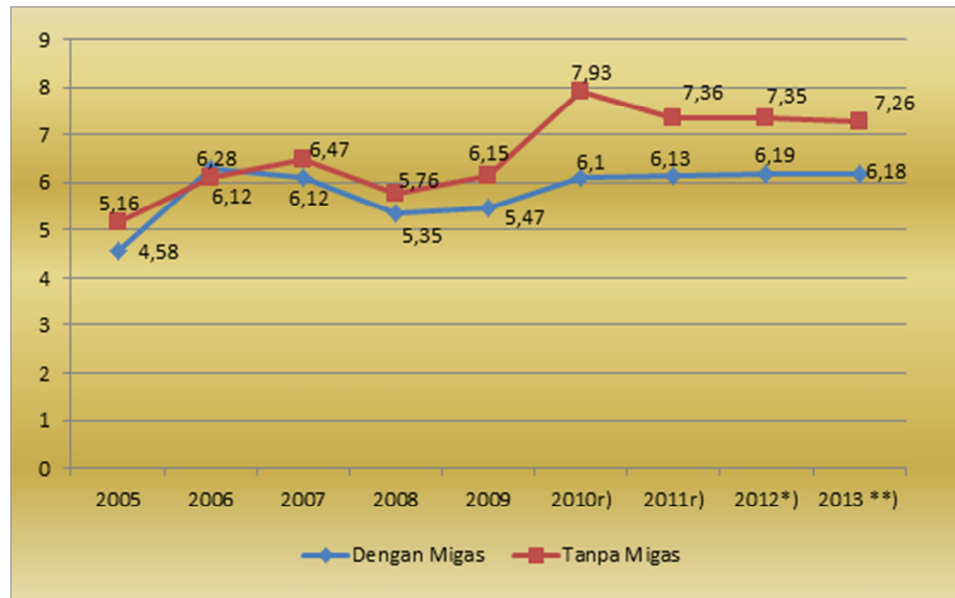
Data Sekunder, Sumber : Badan Pusat Statistik,2014⁸

Pada tahun 2013 tingkat pertumbuhan riil banyuasin sektor ekonomi di Kabupaten Banyuasin sebesar 6,18% dengan migas dan bila tanpa migas mencapai 7,26%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 mengalami perlambatan

⁸Badan Pusat Statistik. Banyuasin dalam Angka. 2014 www.banyuasin.bps.go.id (diakses 12 november 2014) jam 14.00 wib

dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 6,18% sedangkan bila dibandingkan dengan tanpa migas terjadi sedikit perlambatan yang sebesar 7,26%.

Gambar 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Banyuasin



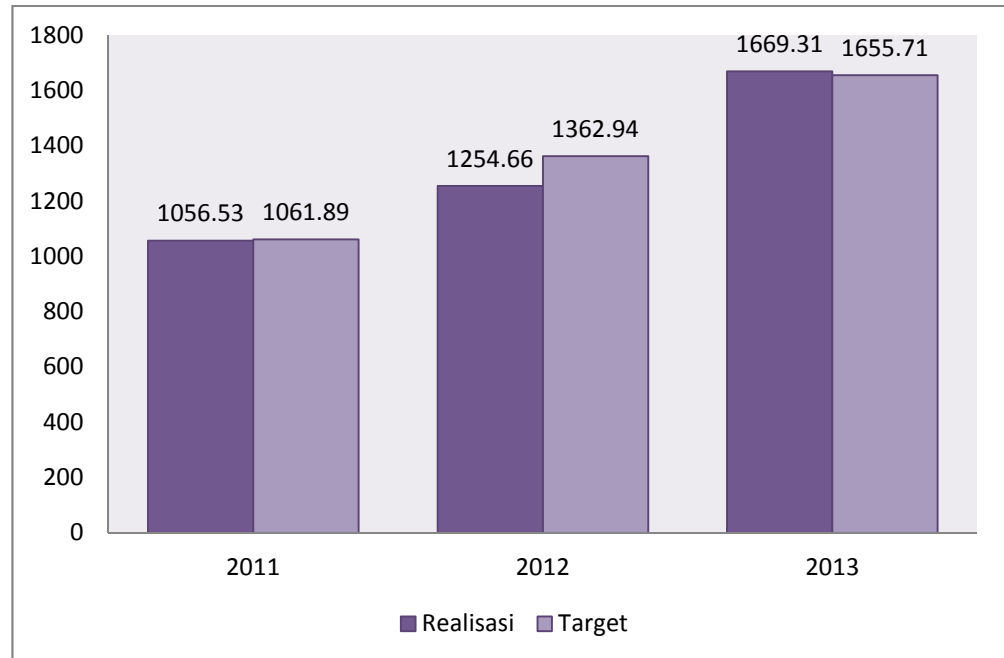
Data sekunder, Sumber : Badan Pusat Statistik, Banyuasin dalam Angka 2014

Biaya pembangunan suatu daerah diperoleh dari dua sumber yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Asset Daerah⁹, Realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2013 mencapai Rp 1,39 triliun. Nilai tersebut meningkat sebesar 10,99% dari yang ditargetkan, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2013 ini meningkat sebesar 31,14%

Gambar 1.3

⁹ Banyuasin dalam Angka 2014. www.banyuasinkab.bps.go.id (diakses 13 november 2014) jam 14.30 wib

**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten
Banyuasin
Tahun 2010-2013 (Milyar Rupiah)**



Data Sekunder, Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam otonomi daerah, Kabupaten Banyuwasin mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat sebagaimana ketentuan dalam Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mengingat perpajakan daerah merupakan salah satu bentuk pembebanan kepada rakyat, maka pajak dan pungutan lain yang memaksa ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana perintah dari ketentuan undang–undang tersebut diatas.

Hasil penerimaan Pajak Daerah diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuasin. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat melalui berbagai mekanisme. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah.

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kabupaten Banyuasin berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya melalui pajak dan retribusi daerah. Dan diharapkan akan meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah. Terdapat kaitan erat antara penerimaan daerah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat. Potensi-potensi yang ada di Banyuasin seharusnya bisa dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Tujuan adanya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah adalah untuk mendorong perekonomian Kabupaten Banyuasin melalui pembangunan sarana prasarana yang menunjang perekonomian. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat.

PAD kabupaten Banyuasin dari tahun 2010-2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan naiknya besaran Rupiah

Murni yang diperoleh dari berbagai sektor dan ditunjang oleh sumber keuangan yang masuk melalui pengembangan berbagai sektor baik industri maupun non industri. peningkatan ini juga tidak lepas dari pembangunan dan pengembangan wilayah industrial serta semakin banyak dibuka perusahaan-perusahaan di wilayah.¹⁰

Tabel 1.1
Realisasi APBD Kabupaten Banyuasin
Tahun 2010-2013
(dalam jutaan rupiah)

| Jenis Pendapatan | Pendapatan Asli Daerah | | | |
|---|------------------------|--------|--------|--------|
| | Tahun | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Pajak Daerah | 6.564 | 10.445 | 25.771 | 31.068 |
| Retribusi Daerah | 5.350 | 6.130 | 12.737 | 30.835 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 972 | 1.596 | 2.809 | 1.891 |
| Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sah | 9.612 | 10.611 | 15.110 | 17.569 |

Data sekunder, Sumber : Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,2014¹¹

Dari hasil Realisasi PAD tahun 2010-2013 dapat terbaca bahwa pendapatan Kabupaten Banyuasin tertinggi terjadi pada tahun 2013. Hal ini sebanding pula dengan Pajak Daerah yang menyatakan bahwa tahun 2013 Pajak Daerah mencapai angka Rp 31.068.000, ini artinya PAD Banyuasin mengalami peningkatan yang sangat pesat. Berdasarkan data diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PAJAK**

¹⁰Lembaga Pemetaan Sosial Daerah-daerah penghasil Minyak dan gas
www.migas.bisbak.com/1607.html (diakses 25 agustus 2014) jam 15.40 wib

¹¹ Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan www.depkeu.dpjik.go.id (diakses 13 november 2014) jam 19.00 wib

**DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN BANYUASIN (Periode 2010-2013)”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah dapat berpeluang untuk mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh bersama-sama terhadap Pendapatan asli Daerah?

C. Batasan Masalah

Penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini yaitu :

1. Variabel Independent yang diteliti adalah pajak daerah dan retribusi daerah untuk Kabupaten Banyuasin.
2. Objek penelitian adalah Kabupaten Banyuasin.
3. Data yang digunakan data realisasi APBD per triwulan tahun 2010-2013 yang merupakan data time series yang direkap dan sehingga dianggap sebagai data resprentif semenjak adanya otonomi daerah.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada:

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
3. Pengaruh kesamaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk melengkapi penelitian serupa yang telah dilakukan terdahulu serta membuktikan apakah dengan variabel yang lebih spesifik akan tetap mendukung hasil dari penelitian sebelumnya atau bahkan dapat memberikan hasil yang berbeda.
2. Dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagai bahan pertimbangan untuk pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada publik.

E. Kontribusi Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin.

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah (Khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin) dalam pengambilan keputusan kebijakan di waktu yang akan datang khususnya dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan.

Penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan. Dengan membandingkan teori-teori yang ada dengan hasil dari penelitian ini.

3. Bagi Lembaga (IAIN Raden Fatah Palembang).

Sebagai bahan perbandingan dari produk pendidikan Universitas, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut khususnya pada pembahasan bidang yang sama sehingga diharapkan munculnya generasi bangsa yang lebih baik dan bertanggung jawab

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara singkat isi dari penelitian yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

2. BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini memaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur, yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah diterapkan untuk selanjutnya digunakan dalam landasan pembahasan dan pemecahan masalah, serta berisi penelitian terdahulu.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang definisi operasional variable yang terdapat dalam penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian serta menguraikan pembahasan mengenai pengaruh penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pembahasan masalah ini dilakukan atas analisis data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yang telah ditetapkan.

5. BAB V : KESIMPULAN

Bab ini adalah bab terakhir dan sekaligus menjadi penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang bersifat membantu dalam penelitian mengenai pengaruh penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyuasin.